

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Bappeda sebagai lembaga teknis Perencanaan daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran dalam prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Jaya, Beberapa sasaran perencanaan pembangunan telah tercapai dengan sangat baik Sedangkan untuk pencapaian sasaran, terdapat beberapa hal yang belum tercapai, hal ini disebabkan oleh mekanisme secara umum dari penyelenggaraan perencanaan. LAKIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Bappeda untuk tahun berikutnya.

Saran

Untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, yang menjadi saran-saran sebagai masukan antara lain adalah :

- ✓ Adanya database serta melakukan pendataan secara berkala dan ter up-date, sehingga pengembangan Data informasi Pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan
- ✓ Meningkatkan koordinasi dengan SKPK dan pihak-pihak terkait, guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok.
- ✓ Perlu menggalakkan program/kegiatan lintas SKPK terkait, guna mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan terintegrasi dengan baik, yang menghasilkan dampak besar dan manfaat jangka panjang.
- ✓ Perlu adanya penambahan anggaran untuk mendukung program-program Perencanaan Pembangunan Daerah

- ✓ Adanya penambahan dan peningkatan Sumber Daya Aparatur, guna mengoptimalkan Tugas Pokok dan Fungsi melalui pendidikan formal maupun non formal serta melalui pendidikan teknis dan fungsional.
- ✓ Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah.
- ✓ Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggung-jawabkan oleh Bappeda Kabupaten Aceh Jaya melalui indikator Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2015 adalah 5 (Lima) sasaran strategis dan 10 indikator kinerja sasaran, disimpulkan bahwa 10 (Sepuluh) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 99%, dikategorikan sangat baik, Dengan demikian semua indikator kinerja berkategori berhasil sehingga perlu dipertahankan pada tahun berikutnya

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (Performing Government) dan juga sebagai laporan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan kegiatan periode Tahun 2015. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi salah satu referensi sebagai bahan evaluasi terhadap apa yang telah dicapai dan yang harus dilanjutkan di tahun-tahun mendatang terutama bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

LAKIP BAPPEDA Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 ini dapat memberikan kontribusi kepada seluruh stakeholder tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA Kab. Aceh Jaya. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini di masa mendatang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi dengan sajian data dan informasi untuk perencanaan yang lebih lengkap dan variatif bagi pembangunan Kabupaten Aceh Jaya.

Penyusunan LAKIP BAPPEDA ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LAKIP BAPPEDA Kabupaten Aceh Jaya tidak terlepas dari kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian BAPPEDA Kabupaten Aceh Jaya telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan ini kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT meridhoi apa yang telah kita laksanakan dan melindungi dalam setiap kegiatan. Amiin....

Calang, 23 Februari 2015
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN ACEH JAYA

MAWARDI, SP. M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 19600525 198203 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Aceh Jaya merupakan Lembaga Teknis Daerah bagian dari Pemerintahan Kab. Aceh Jaya. BAPPEDA berfungsi sebagai perencana pembangunan di daerah melalui upaya memadukan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat/Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*) dengan kebijakan pembangunan kota, kebijakan pembangunan propinsi dan kebijakan pembangunan nasional.

Dalam peraturan dan perundangan yang ada sekarang, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

Dalam penyusunan rencana perlu adanya tujuan dan sasaran sehingga dalam pelaksanaannya tidak menyimpang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu :

1. Penyediaan dokumen perencanaan pembangunan Kab. Aceh Jaya tepat waktu, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipatif berdasarkan asas kebutuhan dan manfaat;
2. Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional dibidangnya masing-masing yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai;
3. Penyediaan basic data baik secara tabular maupun spasial yang akurat dalam bentuk analisis pembangunan yang dapat diakses dengan system on line;
4. Pelaksanaan Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan pembangunan secara merata semua wilayah dan semua sektor;
5. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;

Sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu :

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Kab. Aceh Jaya tepat waktu, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipasif berdasarkan asas kebutuhan dan manfaat;
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional dibidangnya masing-masing;
3. Tersedianya basic data baik secara tabular maupun spasial yang akurat dalam bentuk analisis pembangunan yang dapat diakses dengan system on line;
4. Terlaksananya Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan pembangunan secara merata semua wilayah dan semua sektor;
5. Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran, meskipun secara umum masih terdapat nilai yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini cukup esensial mengingat ketersediaan SDM perencana memegang peranan penting dalam setiap tahapan agenda perencanaan yang telah ditetapkan Hal ini tentunya menjadi catatan penting bagi Bappeda Kab. Aceh Jaya untuk mencari cara supaya kebutuhan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan dapat terpenuhi.

Sebagai upaya menjalankan Qanun Nomor 03 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, juga untuk menjalankan capaian-capaian pembangunan dalam RPJMK Aceh Jaya 2012-2017. Sebagai bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan tersebut di atas maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kab. Aceh Jaya Tahun 2015.

Tuntutan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berangkat dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan informasi yang diharapkan dari laporan tersebut yaitu dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap masyarakat, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak - pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

